

IMPELEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO)

Regi Mokodongan¹, Syafir Ridho Hapili²,
Sofyan Alhadar³, Putri Qomariah Abubakar⁴

Universitas Bina Taruna Gorontalo

regimokodongan@gmail.com, kenhapili08@gmail.com,

putriabubakar251@gmail.com, alhadsof21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan kemiskinan, yang merupakan isu kompleks dan belum terselesaikan di Kota Gorontalo. Sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, kota ini masih memiliki angka kemiskinan yang signifikan. Penelitian ini fokus pada implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program konseling yang dilakukan oleh dinas sosial belum memberikan dampak maksimal dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Kata Kunci: **Kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat**

ABSTRACT

This research aims to examine the problem of poverty, which is a complex and unresolved issue in Gorontalo City. As the capital of Gorontalo Province, this city still has a significant poverty rate. This research focuses on the implementation of the poor community empowerment program carried out by the Gorontalo City Social and Community Empowerment Service. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The research results show that the counseling program carried out by social services has not had the maximum impact in empowering poor communities.

Keywords: *Poverty, Social Services, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Kemiskinan seperti hantu yang terus mengentayangi Masyarakat Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah kompleks yang tak pernah berkesudahan. Kuncoro (dalam Pawawo et al., 2024) menkonstruksikan bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang atau individu untuk memenuhi standar hidup minimum, seperti pendidikan, pakaian, makanan, papan atau tempat tinggal, dan kebutuhan perawatan medis.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan mei 2024 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 25,22%, dan pulau Sulawesi menyumbang angka kemiskinan sebesar 18,18%. Ini bukan angka yang baik tapi angka yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah.

Mengkaji lebih jauh tentang Indonesia, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinis yang mengalami angka kemiskinan tinggi. Kota Gorontalo adalah ibu kota dari provinsi Gorontalo (Arianto et al., 2021). Berdasarkan data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Wilayah kota Gorontalo pada tahun 2023, penduduk yang tercatat miskin sebanyak 102.969 jiwa sedangkan kalau yang tercatat dengan jumlah keluarga sebanyak 34.861 keluarga (sumber: DTKS Kota Gorontalo 2023). Untuk luasan dari keluarga yang terdaftar di DTKS perkecamatan yang ada di Kota Gorontalo bisa dilihat dibawah ini:

Tabel. 1.1 Jumlah Keluarga PerKecamatan yang Terdaftar di DTKS Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Terdaftar DTKS
1.	Kota Barat	4.921
2.	Kota Tengah	3.421
3.	Kota Selatan	3.359
4.	Kota Timur	4.453
5.	Kota Utara	3.607

Sumber (*Dinas Sosial dan Pemberdayan Masyarakat Kota Gorontalo 2023*)

Dari data di atas bisa kita lihat kecamatan yang paling tinggi masyarakatnya terdaftar sebagai Masyarakat Miskin dan harus menerima bantuan ada di kota Barat dengan 4.921 Jiwa, dan kecamatan yang angka sedikit lebih dibawah yang terdaftar di DTKS adalah Kecamatan Kota Selatan sebanyak 3.359 Jiwa. Maka bisa dilihat ada perbedaan jumlah yang begitu besar yaitu 1.562 Jiwa.

Dinas Sosial Kota Gorontalo, yang salah satu juga membidangi terkait dengan penanggulangan Masyarakat miskin dengan pemberian bantaun bersifat tunai, non-tunai dan melakukan pemberdayaan pada Masyarakat. Namun lewat observasi dan wawancara dengan dinas terkait, bahwa dinas sosial telah melakukan model-model penyelesaian masalah kemiskinan. Akan tetapi berdasarkan data yang ada di atas, terjadi ketidak efektifan dari program yang dibuat. Sebab berdasarkan pandangan dari Menurut Mardikanto (Dalam (Putri & Suminar, 2023) Pemberdayaan adalah merupakan proses yang dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan masyarakat yang di kategorikan miskin, marjinal, dan terpingirkan agar menjadi berdaya dengan memandirikan serta merubah kehidupan menjadi lebih baik.

Artinya pemberdayaan yang dilakukan belum lah maksimal sebab, dari data

terpampang jelas angka yang harus diberikan bantuan oleh pemerintah sangatlah tinggi, mendasari hal itu kami ingin melihat bagaimana sebenarnya model pemberdayaan Masyarakat miskin yang ada dikota Gorontalo.

Peneliti menyusun rumusan masalah yang ada di dinas sosial “Bagaimana model pemberdayaan Masyarakat miskin yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Gorontalo?”

Kajian Teori

Konsep Implementasi

Public policy implementation is a dynamic process, where policy implementers carry out an activity or activity, so that in the and they will get a result is in accordance with the goals or objectives of the policy itself (Rifai et al., 2022). Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas yang dinamis, di mana pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang harus di capai.

Sehingga dalam pandangan Akib et al., (2022), bahwa dalam proses implementasi, administrasi publik harus memposisikan diri sebagai fasilitator untuk memberdayakan masyarakat agar bisa tercapainya solusi yang efektif.

Sejalan dengan pandangan di atas, bahwa inti sari dari *public policy*, adalah pelaksanaan kebijakan atau implementasi (Suhardono, 2023), sehingga implementasi kebijakan adalah eksekusi atas persoalan publik (Suhardono, 2023). Sehingga Grindle mengemukakan bahwa implementasi adalah proses aktivitas pemerintah yang dapat di teliti tingkat keberhasilan dari program (Akib, 2010)

Kompilasi pandangan dari beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa “implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah di putuskan, dengan berpatokan pada kaidah dinamisasi atau penyesuaian situasi dan kondisi.

Konsep Masyarakat Miskin

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan multidimensi, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat. Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan dan ketidakberdayaan akibat ketidakmampuan mereka untuk memnuhi kebutuhan dasar kehidupan. Sejak awal permasalahan terkait tentang kemiskinan ini sudah menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Karena kemiskinan adalah sebuah kondisi tentang ketidakmampuan yang dirasakan oleh seseorang atau sekumpulan orang miskin yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yakni berupa kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang baik. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan. (Nurchayani et al., 2024)

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, kemiskinan adalah masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, kemiskinan, kondisi geografis, karakter, budaya, dan lain-lain. Kemiskinan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, tetapi juga dapat dengan mudah ditemukan di perkotaan. Masalah kemiskinan sudah ada sejak sebelum reformasi di Indonesia dan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. (Wulandari et al., 2022)

Setiap kali kita mempertanyakan masalah kemiskinan yang muncul, pasti selalu ada faktor penyebab yang mendasarinya, menurut Hartomo dan Azis (Nurchayani et al., 2024) ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan yaitu sebagai berikut : *Pertama*, Pendidikan Yang Rendah. Pendidikan yang tidak memadai merupakan salah satu penyebab utama kurangnya keterampilan yang diperlukan seseorang untuk beradaptasi di dunia kerja. *Kedua*, Sikap Malas Bekerja. Sikap malas dapat membuat seseorang mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban, serta kehilangan motivasi untuk bekerja dengan serius. *Ketiga*, Keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA). Keterbatasan sumber daya alam pada suatu masyarakat dapat menyebabkan kemiskinan jika sumber daya tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Hal ini sering disebut sebagai kemiskinan karena kurangnya ketersediaan sumber daya alam. *Keempat*, Keterbatasan Lapangan Kerja. Keterbatasan dalam lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, karena hal ini berdampak langsung pada masyarakat. Idealnya, setiap individu seharusnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, namun kenyataannya hal ini sulit untuk dilakukan karena terbatasnya modal dan keterampilan yang dimiliki. *Kelima*, Keterbatasan Modal. Kurangnya modal dapat mengakibatkan kemiskinan, karena individu tidak memiliki cukup dana untuk menyediakan peralatan ataupun bahan yang diperlukan untuk menerapkan keterampilan yang dimiliki guna menghasilkan pendapatan. *Keenam*, Beban Keluarga. Memiliki banyak anggota keluarga tanpa diimbangi dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dapat menyebabkan kemiskinan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Akib, A., Rukinah, R., Wahyuni, R., & Pohan, (2022) Pemberdayaan masyarakat merupakan tahapan pengembangan di mana suatu kelompok masyarakat yang bersedia mengikuti kegiatan sosial dalam memperbaiki keadaan dirinya, sehingga pemberdayaan akan terealisasi dan sukses jika warga ikut terlibat aktif dalam

pelaksanaanya. Pemberdayaan masyarakat ini mencakup kegiatan identifikasi masalah dengan menyusun proses pengambilan keputusan untuk menopang pemecahan masalah kemiskinan dengan teratur dan mandiri.

Menurut Heisnel, dkk. (Dalam (Astuti, DD, Adriani, RB, & Handayani, 2020) Pemberdayaan masyarakat termasuk dalam upaya publisitas kesehatan. Publisitas diterapkan agar dapat meningkatkan kualitas nilai, keterampilan, dan perilaku dalam rangka menuntaskan generasi yang terdampak kemiskinan.

Menurut Mardikanto (Dalam (Putri & Suminar, 2023) Pemberdayaan adalah merupakan proses yang dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan masyarakat yang di kategorikan miskin, marjinal, dan terpingirkan agar menjadi berdaya dengan memandirikan serta merubah kehidupan menjadi lebih baik dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas dan mutu hidupnya.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah berbagai rangkaian atau langkah-langkah yang dapat menjadikan peran masyarakat atau *civil society* untuk mendukung segala proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, pengambilan keputusan maupun kestabilan dalam suatu daerah yang berakhir pada tujuan untuk menuju ke masa depan yang lebih tertata rapi.

Dinas Sosial

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Sedangkan pekerja sosial Masyarakat yang di singkat PSM adalah warga perseorangan/kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial Masyarakat adalah warga Masyarakat perorangan/kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Dalam peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial,

pelayanan dan rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala dinas juga dibantu oleh perangkat organisasi dinas sosial yang terdiri dari sekretaris, bidang pemberdayaan sosial, bidang pelayanan dan rehabilitas sosial, bidang bantuan dan jaminan sosial, bidang kesejahteraan sosial, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, yang bertujuan untuk dapat memahami objek penelitian secara alamiah dan peneliti menjadi instrumen kunci, hal ini berdasarkan pandangan Sugiyono (2017) bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti suatu obyek secara alamiah, di mana peneliti menjadi saran utama dalam penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian berorientasi pada penekanan makna dibanding melakukan generalisasi.

Pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mendeskripsikan (menjelaskan) obyek penelitian secara apa adanya. Sebagaimana dimaksudkan oleh (Arikunto, 2016) melalui penelitian deskriptif, peneliti memiliki maksud untuk memberikan gambaran atau menerangkan suatu gejala.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

(1) Observasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengamatan secara langsung terhadap peristiwa/fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku dan juga makna dari perilaku tersebut. (Roikan, 2019)

(2) Wawancara

Melalui wawancara penelitian akan memperoleh informasi mendalam terkait fokus penelitian, agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi, (Aminah, 2019).

(3) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan penting yang sudah berlalu, baik itu dalam bentuk tulisan atau pun gambar, (Aminah, 2019). Melalui dokumentasi maka menjadi data

pelengkap dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, yang diterangkan oleh Sekertaris Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat ibu Endang (45). Data kemiskinan itu adalah data yang dinamis yang dimana sewaktu-waktu bisa saja berubah, seperti seseorang yang awalnya tidak termasuk didalam kategori miskin bisa saja dengan dia kehilangan pekerjaan kemudian juga karna faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung sehingga membuat dia stres dan sebagainya sehingga dia menjadi tidak terarah lagi maka dia bisa masuk dalam istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini secara langsung berdekatan dengan kemiskinan. Hal ini selaras dengan 14 kriteria masyarakat miskin yang sudah dijelaskan diatas, ketika anggota keluarga sudah memenuhi 9 kriteria maka dia sudah masuk dalam golongan masyarakat miskin.

Yang disampaikan oleh ibu Endang (45) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah melakukan banyak program bantuan yang bertujuan untuk memutuskan kemiskinan namun setelah program-program tersebut sudah realisasikan oleh dinas, tetap masih saja banyak masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha yang baik itu seperti apa, kemudian masyarakat masih banyak yang berfikir konsumtif, contohnya seperti pada saat mereka sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam bentuk uang tunai, seharusnya kebutuhan dari bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih ada juga yang salah memanfaatkannya. Penyebab dari hal ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Maka dari itu Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat sekarang lebih banyak melakukan bimbingan/konseling kepada masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin maupun yang tidak termasuk, guna meningkatkan pola pikir masyarakat agar dapat melihat masalah ini sebagai hal yang patut kita tangani bersama.

Hasil dari program pemberdayaan yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kota gorontalo, bisa dilihat pada data dibawah ini :



Gambar 1 Implementasi Program Pena Di Kota Gorontalo

Model bimbingan yang diberikan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan turun sosialisasi langsung ke masyarakat bersama kelompok pendamping PKH, didalam sosialisasi inilah mereka memeberikan pembinaan dan juga edukasi kepada masyarakat, hal ini cukup evektif. karena banayak masyarakat yang pola pikirnya menjadi terbuka dan melihat bantuan pemerintah bukan lagi menjadi bukan lagi menjadi hal yang penting sehingga bantuan dalam model apapun yang mereka dapatkan, dapat mereka manfaatkan sebagai peluang bisnis agar mereka juga bisa keluar dari garis kemiskinan.

Model sosialisasinya yaitu dengan membagi lima sampai enam kelompok perkelurahan, yang masing-masing dilaksanakan sebulan sekali. Tetapi juga tetap masih ada masyarakat yang memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk kepentingan semata sehingga membuat mereka selalu mengharapkan bantuan setiap bulanya dan mempergunakan bantuan tersebut untuk hal-hal sementara yang tidak begitu mendesak. Mereka juga tidak ada kemauan untuk keluar dari kategori miskin karena mereka selalu mengharapkan adanya bantuan-bantuan berikutnya , inilah pola pikir yang harus diubah pada sebagian masyarakat oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat setiap tahunya.

SIMPULAN

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah menunjukkan niat dan usaha yang besar dalam mengatasi kemiskinan. Program-program seperti bantuan tunai, non-tunai, dan pendampingan melalui bimbingan serta sosialisasi telah dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketergantungan sebagian masyarakat pada bantuan yang diberikan. Banyak yang belum memahami bahwa bantuan tersebut seharusnya digunakan sebagai langkah awal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebaliknya, pola pikir konsumtif sering kali membuat bantuan ini hanya dihabiskan untuk kebutuhan sesaat, tanpa ada upaya untuk berinvestasi dalam pendidikan, usaha kecil, atau kebutuhan lain yang bersifat jangka panjang.

Dinas Sosial sendiri telah berupaya mengatasi masalah ini dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan rutin yang melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami cara memanfaatkan bantuan dengan bijak. Pendekatan ini sudah mulai menunjukkan hasil, di mana sebagian masyarakat mulai mengubah cara pandang mereka terhadap bantuan yang diberikan, meskipun perubahan tersebut belum merata.

Agar program pemberdayaan ini lebih efektif, diperlukan strategi yang lebih terfokus, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan peningkatan akses lapangan kerja. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak dapat membantu masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri.

Pada akhirnya, program pemberdayaan ini adalah langkah penting dalam mengurangi kemiskinan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan pola pikir masyarakat dan komitmen semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif, diharapkan masyarakat miskin di Kota Gorontalo dapat keluar dari garis kemiskinan dan hidup dengan lebih mandiri serta bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, A., Rukinah, R., Wahyuni, R., & Pohan, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Mendampingi Perkembangan Motorik Halus Balita Stunting. *Abdimas Polsaka*, 50–54.
- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. 1(1), 1–11.

- Akib, H., Abdullah, N. R., Niswaty, R., & Hardiyanti, S. (2022). Maintenance of Office Facilities at the Makassar City Public Works Service. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 12(1), 69–76.
- Arianto, D., Wantu, S. M., & Aneta, Y. (2021). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(11), 1847–1855.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Astuti, DD, Adriani, RB, & Handayani, T. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menghentikan generasi stunting. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 156–162.
- Nurchayani, I., Aneta, A., Prihatini, F., & Tui, D. (2024). Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial di Kota Gorontalo. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 209–216.
- Pawawo, A. S., Tahir, A., & Sulila, I. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 1–11.
- Rifai, Lilik E, M. R., & Suhardono, E. (2022). Implementation of Policy for Handling of Hazardous Goods in the Effort To Achieve the Safety and Security of Ro-Ro Ships in Tanjung Silver Utama Kesyahbandaran. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 4(2), 51–62. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v4i2.312>
- Roikan, A. S. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.)). Alfabeta.
- Suhardono, E. (2023). *Kebijakan Kemaritiman Indonesia Formulasi Dan Implementasi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). 1347-Article Text-3398-1-10-20220228. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218.